

MEMBEDAH DISHARMONISASI REGULASI DALAM PROGRAM JKN



SUNDOYO, SH, MKM, MH
BIRO HUKUM DAN ORGANISASI KEMENTERIAN KESEHATA



**PSL 28
UUD 45**

Setiap orang
berhak
memperoleh
pelayanan
kesehatan

Negara
berkewajiban
menyediakan
fasilitas pelayanan
kesehatan

**PSL 34
UUD 45**

TAHUN 2004

Undang-Undang No. 29

TAHUN 2009

1. Undang-Undang No. 35
2. Undang-Undang No. 36
- 3. Undang-Undang No. 44**
4. Undang-Undang No. 52

TAHUN 2014

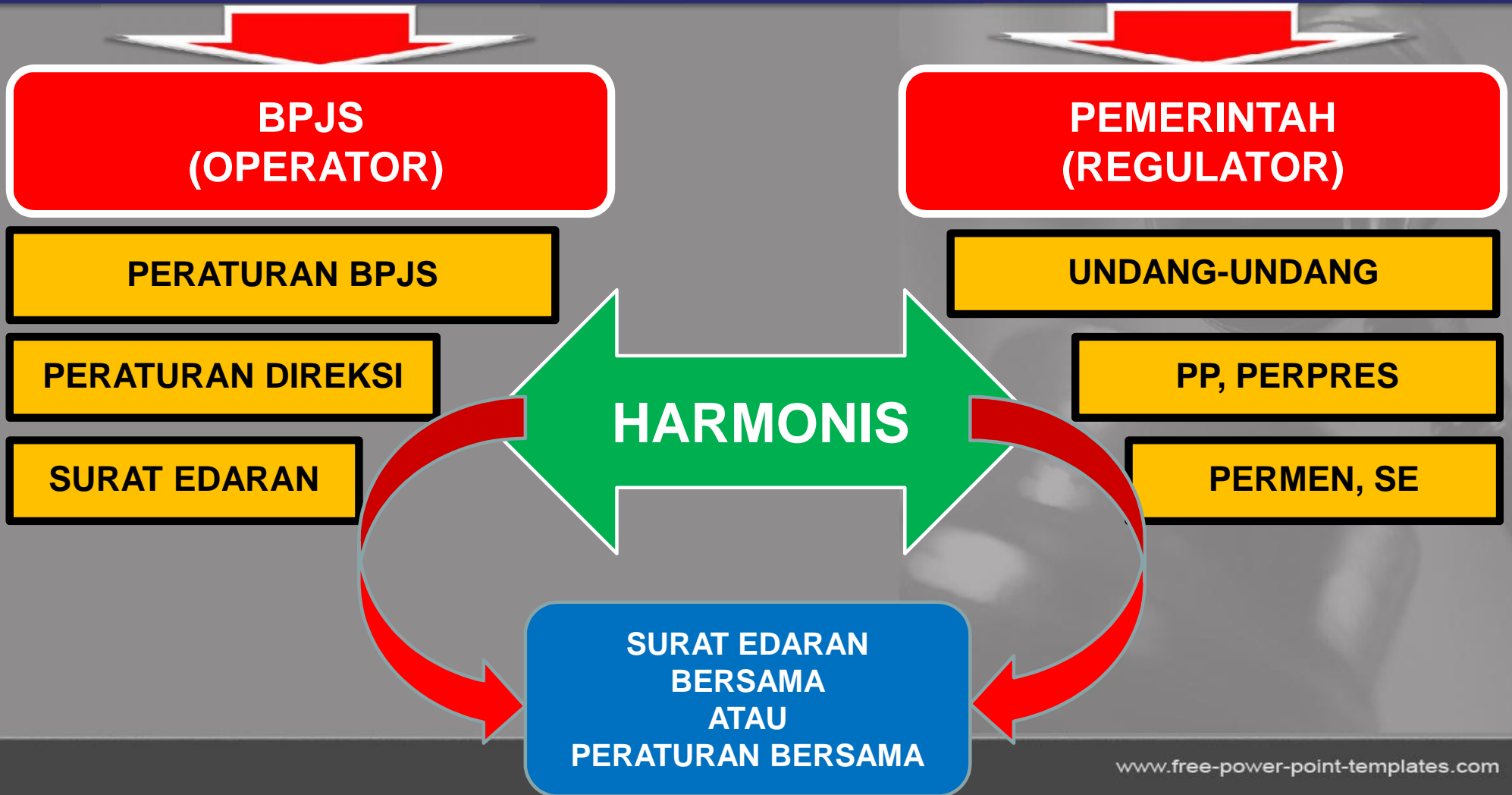
1. Undang-Undang No. 18
2. Undang-Undang No. 36
3. Undang-Undang No. 38

FASKES

**FKTP &
FKRTL**

**MUTU
PELAYANAN
DAN
PACIENT
SAVETY**

REGULASI BIDANG JKN



PERKEMBANGAN REGULASI BIDANG JKN

NO	REGULASI	PERUBAHAN
1	PP No 101 Th 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan	Telah diubah dengan PP No 76 Th 2015 tentang Perubahan Atas PP No 101 Th 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan
2	PP No 87 Th 2013 tentang Pengelolaan Aset Jaminan Sosial Kesehatan	Telah diubah dengan PP No 84 Th 2015 tentang Perubahan Atas PP No 87 Th 2013 tentang Pengelolaan Aset Jaminan Sosial Kesehatan
3	Perpres No 12 Th 2013 tentang Jaminan Kesehatan	Telah diubah dengan: <ol style="list-style-type: none"><li data-bbox="1136 883 2018 1013">1. Perpres No 111 Th 2013 tentang Perubahan Atas Perpres No 12 Th 2013 tentang Jaminan Kesehatan<li data-bbox="1136 1029 2018 1159">2. Perpres No 19 Th 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Perpres No 12 Th 2013 tentang Jaminan Kesehatan<li data-bbox="1136 1175 2018 1305">3. Perpres No 28 Th 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Perpres No 12 Th 2013 tentang Jaminan Kesehatan

PERKEMBANGAN REGULASI BIDANG JKN (1)

NO	REGULASI	PERUBAHAN
4	Permenkes No 71 Th 2013 tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional	Telah diubah dengan Permenkes No 99 Th 2015 tentang Perubahan Atas Permenkes No 71 Th 2013 tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional
5	Permenkes No 19 Th 2014 tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah	Telah diubah dengan Permenkes No 21 Th 2016 tentang Perubahan Atas Permenkes No 19 Th 2014 tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah
6	Permenkes No 59 Th 2014 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan	Permenkes No 12 Th 2016 tentang Perubahan Atas Permenkes No 59 Th 2014 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan

REGULASI BIDANG JKN



DISHARMONIS

PENAFSIRAN

IMPLEMENTASI PROGRAM JKN

**TIDAK SESUAI DENGAN KEINGINAN INDIVIDU
/MASYARAKAT**

TINDAK LANJUT PERUBAHAN REGULASI BIDANG JKN



PERPRES 19/2016

**PASAL 17 A.1
TUNGGAKAN
DAN
DENDA**

PERATURAN BPJS

**PERUBAHAN PP 87
YANG KEDUA**

PERPRES 19/2016

**PASAL 29
REDISTRIBUSI DARI
SATU FKTP KE FKTP
LAINNYA**

PERATURAN BPJS

PERMENKES 99/2015

**PASAL 9
KREDENSIALING
MELIBATKAN
DINKES DAN
ASOSIASI FASKES**

PERATURAN BPJS

terima kasih

